

Title : Mural Sebagai Katup Penyelamat Demokrasi

Author(s) : Arief Hanafi

Institution : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo

Category : Opinion, Competition

Topics : Sociology

Mural Sebagai Katup Penyelamat Demokrasi

(Arief Hanafi)

Belakangan marak fenomena mengkritisi pemerintah melalui mural. Namun disaat yang sama mural-mural tersebut justru dihapus oleh petugas. Seperti di salah satu flyover Kota Bandung yang menampilkan gambar mirip Jokowi dengan mata tertutup masker. Selain itu, Di Kota Yogyakarta mural bertuliskan 'DIBUNGKAM' juga dihapus oleh petugas, dan yang paling membuat heboh adalah di Tangerang, mural bergambar mirip Jokowi dengan tambahan tulisan '404: Not Found' juga dihapus oleh petugas Satpol PP dengan cat hitam. Di tempat lain seperti di Batam dan Jakarta Selatan penghapusan mural oleh aparat juga tidak kalah gencarnya.

Mural bernada kritik sebenarnya tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat yang sedang dialami. Dalam konteks sejarah, mural pernah menghiasi perjalanan bangsa ini, khususnya saat masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Rata-rata mural era ini berisi propaganda untuk melawan penjajah.

Harry Poeze (2008) menggambarkan situasi kota-kota pasca kemerdekaan dipenuhi dengan pamflet dan coretan-coretan tembok, menggelorakan semangat perjuangan untuk melawan kolonialisme. Bahkan sejarawan Belanda ini menyebut Tan Malaka merupakan aktor yang menggelorakan semangat perjuangan melalui mural. Ia mengajak segenap pemuda waktu itu untuk menggoreskan pekikan kemerdekaan di tembok-tembok jalanan.

Mural dalam perjalanannya mempunyai arti penting bagi masyarakat luas. Selain sebagai karya seni, mural juga sarat dengan pesan yang bermakna. Hal tersebut cukup beralasan, pasalnya esensi mural sebagian besar merupakan representasi atas kondisi sosial yang ada. Selain itu tampilannya identik dengan gambar visual, sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melihatnya. Maka tidak berlebihan jika eksistensi mural juga menjadi bagian dari warna-warni kehidupan demokrasi di suatu negara.

Menyoal Penghapusan Mural

Penghapusan mural yang dilakukan petugas menurut hemat penulis tidak sepenuhnya tepat. Terlebih dengan argumentasi yang kurang rasional. Kebijakan yang kurang tepat ini bisa mengganggu stabilitas demokrasi kita. Dalam konteks ini kita sedang melihat bagaimana mural sebagai media menyampaikan aspirasi atau kritik sedang mendapatkan tantangan. Pada era demokrasi kini justru patut dipertanyakan masih ada pihak yang merasa risih dengan kritik-kritik sosial yang disampaikan melalui mural.

Dalam situasi pandemi covid-19 yang serba tidak pasti ini, harusnya pemerintah mampu mengelola konflik kepentingan ini dengan lebih bijak. Untuk mengelolanya tentu dengan cara evaluasi diri. Jangan-jangan ada sebuah kondisi atau kebijakan yang tidak normal. Dengan demikian perlu dicari tahu kebenarannya.

Bisa saja penggunaan mural yang marak ini dikarenakan sistem penyampaian aspirasi formal di pemerintah yang tidak berfungsi dengan baik. Sistem yang ada tidak lagi mampu menampung membuat sebagian masyarakat mencari media lain untuk menyuarakan. Anggapan tersebut agaknya tidak sepenuhnya salah, pasalnya kinerja pejabat negara khususnya di masa pandemi ini dinilai tidak konsisten dan terkesan tidak pro rakyat.

Jika kita lihat awal pandemi, Maret 2020 DPR mengeluarkan kebijakan untuk memeriksa secara khusus 575 orang anggota DPR, memakai rapid tes. Berlanjut di akhir februari 2021 ada kegiatan vaksinasi anggota DPR dan keluarga dan staf yang dilakukan di area gedung MPR/DPR secara tertutup.

Ironisnya lagi adanya usulan kebijakan pembangunan rumah sakit covid-19 khusus untuk kalangan pejabat. Meskipun pada akhirnya pernyataan tersebut ditarik karena memang menuai banyak kritik. Dalam waktu yang hampir bersamaan diperparah dengan kasus banyaknya korupsi dari pejabat eksekutif. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi rakyat kecil.

Selain itu dengan adanya mural yang kesadaran kolektif dalam berbangsa dan bernegara akan terbangun. Hal tersebut menjadikan masyarakat semakin sadar dengan realitas yang sesungguhnya, bahwa narasi besar tentang keadilan, kesejahteraan dan keamanan, yang ternyata masih jauh dari sebuah fakta.

Katup Penyelamat

Di tengah gempuran nir moralitas yang ditampilkan oleh para pejabat publik di masa pandemi covid-19, agaknya tidak berlebihan jika mural sebagai alternatif kanalisasi opini publik. Sehingga pada konteks ini mural menjadi katup penyelamat demokrasi kita. Sebagaimana dijelaskan Coser (1956), keberadaan katup penyelamat dalam sebuah struktur sangat penting. Ketika mural dibiarkan eksis maka di waktu bersamaan rakyat dan pemerintah bersinergi untuk memikirkan jalan keluar bersama, artinya hubungan masyarakat dan pemerintah tidak tajam.

Kondisi berbeda jika pemerintah melakukan tindakan represif, hal ini menjadi bomerang bagi keutuhan struktur sosial, yang berujung pada konflik yang lebih tajam. Hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya mural jalanan di berbagai daerah. Hal ini menegaskan bahwa jika ruang-ruang aspirasi ditutup mempunyai kecenderungan konflik yang lebih besar.

Bagi sosiolog asal negeri Paman Sam ini, peran katup penyelamat mengatur jika terjadi suatu konflik tidak merusak semua struktur yang ada, katup penyelamat membantu memperbaiki keadaan suatu kelompok yang mengalami konflik. Dengan demikian mural sebagai katup penyelamat memungkinkan pengungkapan rasa tidak puas terhadap peran pemerintah akan lebih efektif.

Karena pentingnya katup penyelamat, maka seyogyanya pemerintah sangat terbuka dalam menerima kritik sosial. Dalam konteks mural, akan lebih bijak jika karya-karya tersebut tetap

terpajang secara utuh. Hal ini menjadi kontrol sosial dari rakyat untuk pemerintah. Sehingga dalam perjalanan bangsa, mural tidak hanya sebagai seni dalam mengkritik kebijakan, namun lebih dari itu, mural sebagai bagian dari artefak tentang perjalanan bangsa dari setiap momen.